



Judul : Dugaan penyimpangan: mendikbud bantah BAKN DPR
Tanggal : Jumat, 07 September 2012
Surat Kabar : Suara Karya
Halaman : 5

DUGAAN PENYIMPANGAN

Mendikbud Bantah BAKN DPR

JAKARTA (Suara Karya): Dugaan penyimpangan tata kelola keuangan di 16 perguruan tinggi negeri (PTN) dan 3 direktorat di Kemendikbud senilai ratusan miliar rupiah, sebagaimana dikatakan anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) yang juga sebagai anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, dibantah keras oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh.

Kepada wartawan, Kamis (6/9), M Nuh mengatakan, data yang beredar selama ini sudah ditindaklanjuti sebanyak 50 persen. Berdasarkan telaah Inspektorat Kemendikbud, hingga kini belum ditemukan indikasi korupsi.

Menurut M Nuh, data tersebut merupakan tahun

anggaran 2008, 2009, dan 2010. "Temuan yang ada diperoleh Inspektorat, misalnya, kontraktor terlambat, dia kan kena denda, denda belum ditagih. Kalau ditagih, selesai sudah," ujarnya.

Selain itu, kata dia, persoalan dalam proyek itu muncul, karena ada yang dalam proses pengadaan menemui masalah, namun belum melakukan komplain.

"Tidak ada komplain. Misalnya pesan seperti apa, lalu ternyata tidak sesuai dengan aturan. Tetapi yakin bisa diselesaikan. Bukan saya menerima 100 atau 200. Nggak apa-apa nanti kita selesaikan," ujarnya menambahkan.

Sementara itu menyangkut dugaan adanya pengadaan barang fiktif, ia mengaku hingga saat ini pihaknya be-

lum menemukan kasus tersebut. Jika ada, katanya, hal itu sudah diketahui sejak lama.

M Nuh juga menanggapi soal tuduhan adanya barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Menurut dia, hal itu masih dalam proses pendalaman di internal kementeriannya.

Irjen Kemendikbud Haryono Umar mengatakan, terkait dengan rekomendasi BPK, pihak Kemendikbud telah mengirimkan surat kepada perguruan tinggi negeri yang disebut bermasalah.

"Tentang adanya temuan itu kita surati semua, kemudian mereka menindaklanjuti dan para perguruan tinggi meminta para rekanan untuk menyetorkan yang sesuai rekomendasi BPK itu," ujar Haryono.

Meski demikian, ada beberapa perguruan tinggi yang tetap berkeyakinan telah melakukan hal yang benar. Pihaknya juga telah mengundang para Pembantu Rektor II untuk membahas hal ini.

"Ada yang mau menyetorkan, tapi ada juga yang bertahan bahwa sudah benar. Proses negosiasi ini yang kita lakukan. Bahkan kita sudah undang juga para Pembantu Rektor II dan memang ini prosesnya berlanjut terus dan tidak bisa sekaligus," ujarnya menambahkan.

Ia juga menegaskan bahwa pihaknya tidak menemukan kasus penggelembungan anggaran (*mark-up*) dan pengaturan tender.

(Sugandi)